

PROSES KOLABORATIF DALAM PENGEMBANGAN GEOPARK PONGKOR SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA DI KABUPATEN BOGOR

Karina Widya Aristy¹; Candradewini²; R. Ahmad Buchari³

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

¹karina16005@mail.unpad.ac.id; ²candradewini@unpad.ac.id; ³ahmad.buchari@unpad.ac.id

ABSTRACT

This research explains the collaborative process in the development of the Pongkor Geopark in Bogor Regency. The story of the Geopark area is motivated by the need to improve the local economy sustainably without losing the function of the area. Developing the Pongkor Geopark area involves several stakeholders consisting of government, business, academia, and community. Realizing the Pongkor Geopark as a sustainable and competitive tourism destination, which contributes greatly to economic development, requires optimal and synergic collaboration among stakeholders. However, the natural condition is that the collaborative process was still out of expectation. This study uses a qualitative method that aims to analyze the collaborative process in developing the Pongkor Geopark through 5 (five) aspects of the collaborative process from Ansell and Gash (2008). The results showed that the collaborative process that was not optimal was caused by the lack of synergy between collaborative stakeholders. The implementation has not considered essential aspects, namely communication that has not been established between stakeholders, low trust, shared understanding and commitment, and the absence of perceived outcomes.

Keywords: collaboration, collaborative process, geopark development, Pongkor Geopark

COLLABORATIVE PROCESS IN THE DEVELOPMENT OF PONGKOR GEOPARK AS A TOURISM AREA IN BOGOR REGENCY

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang proses kolaboratif dalam pengembangan Geopark Pongkor di Kabupaten Bogor. Pengembangan kawasan geopark tersebut dilatarbelakangi dari adanya kebutuhan untuk meningkatkan ekonomi lokal secara berkelanjutan tanpa menghilangkan fungsi wilayah. Pelaksanaan pengembangan Geopark Pongkor melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri dari *stakeholder* pemerintah, bisnis, akademisi, dan masyarakat/komunitas. Untuk mewujudkan Geopark Pongkor sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta berkontribusi besar dalam pembangunan ekonomi diperlukan kolaborasi yang optimal dan sinergis diantara para pemangku kepentingan. Namun, dalam kenyataannya kolaborasi yang dilakukan masih belum sesuai dengan harapan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis proses kolaboratif dalam pengembangan Geopark Pongkor melalui 5 (lima) aspek proses kolaboratif dari Ansell dan Gash (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif yang belum optimal disebabkan oleh belum sinergisnya *stakeholder* kolaborasi. Pelaksanaannya belum mengindahkan aspek-aspek penting yaitu komunikasi yang belum terjalin di antara *stakeholder*, rendahnya kepercayaan, pemahaman bersama, dan komitmen, serta belum adanya hasil yang dirasakan.

Kata kunci: kolaborasi, proses kolaboratif, pengembangan geopark, Geopark Pongkor

PENDAHULUAN

Administrasi Publik berperan besar dalam rangka membantu pemecahan masalah-masalah publik yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah. Kompleksitas permasalahan yang terjadi di masyarakat saat ini tidak hanya dapat diselesaikan oleh pemerintah saja, namun juga memerlukan sinergitas yang baik dari berbagai *stakeholder* diantaranya yaitu pemerintah, sektor bisnis, akademisi, dan masyarakat untuk menemukan solusi dari berbagai permasalahan tersebut.

Pembangunan daerah di Kabupaten Bogor saat ini berfokus pada wilayah Bogor Barat. Hal ini dikarenakan

Bogor Barat dalam pemetaan kondisi sosial dan ekonomi masuk ke dalam Kuadran III yang merupakan wilayah dengan nilai PDRB dan IPM dibawah standar atau rendah. Maka, dengan mempertimbangkan kondisi geografisnya Pemerintah Kabupaten Bogor mencoba untuk mengembangkan Taman Bumi atau *Geopark*. Konsep geopark diharapkan dapat menjawab berbagai rencana pengembangan kawasan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah tanpa harus kehilangan fungsi lahan dan perlindungan tata air. Geopark merupakan kawasan geografis tunggal dan terpadu yang memiliki situs sejarah alam sebagai kawasan yang berfungsi untuk melestarikan warisan alam, yang dapat dijadikan objek pendidikan dan

menjadi kawasan geowisata yang terus berkembang dan berkelanjutan. Pengembangan geopark utamanya dilakukan melalui pengembangan destinasi pariwisata.

Geopark Pongkor diresmikan pada tahun 2018 melalui Surat Keputusan Bupati Nomor: 556/177/Kpts/Per-UU/2018, meliputi 15 kecamatan dengan 172 desa dan 33 geosite yang bisa dikembangkan. Berdasarkan karakteristik geologi dan kondisi topografinya, kawasan Geopark Pongkor kemudian dibagi menjadi 4 (empat) kluster geologis, yakni Pongkor, Tenjolaya, Leuwiliang, dan Parung yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Lingkup Wilayah Geopark Pongkor

No.	Kluster	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Pongkor	Nanggung	15.929
		Sukajaya	15.646
		Jasinga	14.308
		Cigudeg	17.761
		Tenjo	8.666
2.	Tenjolaya	Tenjolaya	4.135
		Tamansari	3.433
		Pamijahan	9.515
3.	Leuwiliang	Leuwiliang	9.032
		Ciampea	3.304
		Cibungbulang	3.845
		Leuwisadeng	3.340
4.	Parung	Parung	3.574
		Rumpin	13.736
		Ciseeng	4.129
Total			130.157

(Sumber: Bappedalitbang Kab. Bogor, 2020)

Untuk mendorong percepatan pengembangan pariwisata di 4 (empat) kluster tersebut dibentuklah Badan Pengelola Geopark Pongkor. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) bahwa dalam pelaksanaan pengembangan geopark perlu melibatkan pemangku kepentingan. Badan Pengelola Geopark Pongkor bukan hanya melibatkan pemerintah daerah, namun juga menyertakan *stakeholder* lain yang terdiri dari sektor bisnis, akademisi, dan komunitas lokal/masyarakat. Tata kelola dalam pengembangan kawasan Geopark Pongkor yang melibatkan berbagai unsur *stakeholder* ini kemudian dituangkan di dalam Surat Keputusan Bupati Nomor: 556/136/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembentukan Badan Pengelola Geopark Nasional Pongkor. Adapun pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan Geopark Pongkor di Kluster Pongkor diantaranya yaitu Bappedalitbang, Disbudpar, dan Kecamatan Nanggung sebagai unsur pemerintah; PT. Antam UBPE Pongkor sebagai unsur bisnis; Universitas Pakuan sebagai unsur akademisi; serta Yayasan Lingkar Pongkor dan BUMDes Bantar Karet Kecamatan Nanggung sebagai unsur komunitas/masyarakat.

Dalam melakukan kolaborasi, proses kolaboratif perlu diperhatikan karena merupakan tahapan paling penting di antara tahapan kolaborasi lainnya dan menjadi penentu utama keberhasilan suatu kolaborasi. Namun,

pada pelaksanaan kolaborasi pengembangan Geopark Pongkor masih ditemukan permasalahan yang terlihat dari adanya ego sektoral antar *stakeholder*. Hal ini ditandai dengan PT. Antam UBPE Pongkor yang masih beroperasi dengan melakukan perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP), Disbudpar yang masih berfokus pada programnya sendiri, Kecamatan Nanggung dan masyarakat yang masih bersikap pasif, serta Bappedalitbang yang masih berperan dominan dalam pengadaan inovasi. Sehingga, mengakibatkan pihak-pihak yang terlibat belum dapat berkolaborasi secara sinergis karena masih tertuju pada kepentingannya masing-masing.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, sehingga penulis dapat mengkaji persepsi, pengalaman, dan cara pandang dari partisipan yang mempunyai wewenang, peran, informasi, data maupun keterkaitan lainnya dengan pengembangan Geopark Pongkor di Kabupaten Bogor. Selain itu, dengan metode kualitatif juga dapat dikaji proses kolaboratif yang terjadi, bagaimana peran pemangku kepentingan yang terlibat, dan bagaimana interaksi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan Geopark Pongkor. Kluster Pongkor merupakan pusat pengembangan utama di Geopark Pongkor dengan luas wilayah yang mencapai 56% keseluruhan wilayah Geopark Pongkor, oleh karena itu penulis memilih Kluster Pongkor sebagai lokus penelitian.

Penelitian dilakukan untuk menganalisis proses kolaboratif dalam pengembangan Geopark Pongkor yang yang berpedoman pada teori kolaborasi Ansell dan Gash (2008) bahwa proses kolaboratif mencakup 5 (lima) aspek, yakni: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses, pemahaman bersama, dan adanya hasil konkret.

Data yang dikumpulkan oleh penulis berupa data primer dan data sekunder, yang dalam praktiknya dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan aktivitas analisis data menurut Creswell (2016) dimana terdapat 6 (enam) tahapan analisis data kualitatif, yaitu: persiapan data, membaca data, pemberian kode, deskripsi kode, penyajian data, serta interpretasi data. Adapun triangulasi sumber digunakan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori yang menjadi acuan dalam penelitian yang penulis lakukan, keberhasilan kolaborasi dapat dilihat melalui proses kolaboratif yang dilakukan. Proses kolaboratif dapat dimaknai sebagai sebuah siklus atau proses berulang. Siklus ini penting di semua tahapan kolaborasi dan merupakan inti pelaksanaan kolaborasi. Proses kolaboratif mencakup pengaturan masalah, proses negosiasi untuk mengatasi masalah yang ada, sampai kepada implementasinya. Keberhasilan pelaksanaan proses kolaboratif menurut Ansell dan Gash (2008) dapat dilihat dari pencapaian siklus yang baik di antara 5 (lima) aspek, yaitu komunikasi, kepercayaan, komitmen, pemahaman

bersama, dan hasil.

a. Dialog Tatap Muka

Sebagai proses yang berorientasi pada konsensus, komunikasi yang intim sangat diperlukan untuk meraih keuntungan bersama. Adanya dialog tatap muka bukan hanya sebagai sarana negosiasi, tetapi juga menjadi pemecah stereotip dan aspek utama untuk proses membangun kepercayaan, pemahaman bersama, serta komitmen dalam menjalin kolaborasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, belum ada agenda pertemuan rutin antar *stakeholder* untuk diskusi terkait kegiatan pengembangan yang akan dilakukan. Pertemuan yang diadakan masih didasarkan pada urgensi, sehingga sering atau tidaknya bergantung pada kebutuhan saat itu. Kegiatan pertemuan dan rapat paling banyak dilakukan di tahun 2018 dalam rangka persiapan menuju geopark nasional dengan anggota Badan Pengelola saat itu yaitu Bappedalitbang, Disbudpar, PT. Antam, Kecamatan Nanggung, serta Unpak selaku konsultan. Di tahun tersebut Badan Pengelola juga aktif melakukan sosialisasi kepada aparat desa dan masyarakat di kawasan Geopark Pongkor mengenai rencana pengembangan yang akan dilakukan. Namun, setelah terjadi perubahan susunan Badan Pengelola di tahun 2019 intensitas pertemuan menjadi berkurang, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi tiap *stakeholder* kolaborasi.

Meskipun pertemuan tatap muka jarang dilakukan, pihak Bappedalitbang, PT. Antam, dan Unpak mengutarakan bahwa tetap ada komunikasi yang dijalin secara informal melalui *WhatsApp*. Sedangkan, pihak Disbudpar dan Kecamatan Nanggung menyatakan bahwa selama ini belum ada komunikasi informal yang dijalin dengan *stakeholder* lainnya. Komunikasi hanya dilakukan melalui agenda rapat setelah mendapat undangan dari Bappedalitbang.

Dalam dokumen *Dossier* (2018), objek wisata atau *geosite* akan dikelola oleh masyarakat dengan arahan dari Kecamatan Nanggung selaku Manager Klaster, termasuk kawasan wisata yang dibangun oleh PT. Antam UBPE Pongkor. Belum dilibatkannya masyarakat dalam pengelolaan *geosite* ini menimbulkan konflik di antara PT. Antam dan masyarakat setempat. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada dialog antara pemerintah (Bappedalitbang/Disbudpar), PT. Antam, Kecamatan Nanggung, dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Padahal adanya komunikasi di dalam kolaborasi bukan hanya menjadi dasar dalam berbagi pemahaman, tetapi sebagai sarana pemecah konflik maupun mencegah kesalahpahaman (Ansell dan Gash, 2008: 558).

Unpak selaku akademisi juga belum berinteraksi dengan setiap *stakeholder* kolaborasi terkait pengetahuan yang dimilikinya. Komunikasi lebih banyak dijalin dengan Bappedalitbang. Hingga saat ini juga belum ada komunikasi yang dilakukan PT. Antam UBPE Pongkor dengan Disbudpar terkait rencana pembangunan maupun mekanisme pengelolaan kawasan wisata yang dibangun oleh PT. Antam tersebut. Pasalnya pihak Disbudpar menyatakan bahwa sebenarnya PT. Antam belum

mengantungi izin untuk mengelola kawasan wisata.

b. Membangun Kepercayaan

Kolaborasi seringkali dihadapkan pada rendahnya rasa percaya, terlebih jika sebelumnya terdapat riwayat hubungan yang kurang baik. Maka membangun kepercayaan menjadi suatu keharusan. Meski begitu, prosesnya memakan waktu yang lama, sehingga setiap *stakeholder* perlu dilandasi komitmen yang tinggi untuk mencapai adanya rasa saling percaya di kemudian hari.

Untuk membangun kepercayaan tiap *stakeholder* kolaborasi, pemerintah melakukan sosialisasi agar informasi terkait pengembangan Geopark Pongkor dapat tersebar secara merata. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung (tatap muka) dan secara digital (media sosial). Akan tetapi, kegiatan tersebut belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Begitupun dengan pemberian informasi secara digital belum dilakukan secara jelas, karena kurang aktifnya media sosial, serta *website* yang seringkali sulit diakses dan banyak informasi yang belum tersedia.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangannya belum ada dokumen/laporan tahunan yang memuat informasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh Badan Pengelola. Dari setiap *stakeholder* juga belum ada tuntutan untuk membuat laporan progress kegiatan yang dilakukan. Begitupun dengan rencana induk (*master plan*) belum terbentuk. Padahal jika mengacu kepada Perpres Nomor 9 Tahun 2019 disebutkan bahwa suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai geopark apabila sudah memiliki rencana induk. Hal ini tentu menghambat proses membangun kepercayaan, karena kurangnya transparansi dalam kegiatan yang dilakukan sehingga menimbulkan persepsi negatif *stakeholder* lain. Karena belum adanya informasi yang jelas mengenai pengembangan yang dilakukan ini, masyarakat berpendapat bahwa pengembangan Geopark Pongkor ini hanya kepentingan dari pihak-pihak tertentu saja, yaitu Bappedalitbang dan PT. Antam. Ada persepsi itu pula yang mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat semakin menurun dalam melakukan kolaborasi pengembangan Geopark Pongkor. Hal ini menunjukkan bahwa dialog tatap muka dan komunikasi belum terjalin dengan baik, sebab belum tercapainya tujuan utama dari dialog tatap muka, yaitu pemecahan stereotip (Bentrup, 2001) dan membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan (Gilliam et al., 2002; Lasker dan Weiss 2003; Plummer dan Fitzgibbon 2004; Warner 2006).

c. Komitmen dalam Proses Kolaborasi

Komitmen berhubungan erat dengan maksud atau niat dari setiap pemangku kepentingan untuk ikut serta dalam kolaborasi. Komitmen juga bergantung kepada kepercayaan dimana perspektif dan kepentingan yang dibawa masing-masing pihak harus dihargai, karena pada akhirnya setiap *stakeholder* akan saling berbagi tanggung jawab. Komitmen juga memerlukan adanya ketergantungan yang tinggi satu sama lain.

Pada kolaborasi dalam pengembangan Geopark Pongkor setiap pemangku kepentingan perlu berteguh pada

komitmen-komitmen yang sudah disepakati sebelumnya. Namun, dalam kolaborasi yang dilakukan komitmen dari beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelanggaran komitmen yang dilakukan oleh PT. Antam UBPE Pongkor selaku sektor bisnis. Dengan perpanjangan IUP yang dilakukan tidak sesuai dengan komitmen untuk mendukung segala upaya yang dilakukan dalam mengembangkan Geopark Pongkor dan peningkatan statusnya menjadi UGG, Sebab untuk masuk ke dalam jaringan geopark global tidak memperbolehkan adanya kegiatan eksploitasi SDA termasuk diantaranya kegiatan tambang, karena bertentangan dengan nilai-nilai konservasi.

Disbudpar, Kecamatan Nanggung, dan masyarakat juga belum mampu menjalankan komitmennya. Berdasarkan wawancara, kurang dilibatkan dan kurang didengar pendapatnya dalam pelaksanaan pengembangan geopark, serta belum jelasnya rencana pengembangan yang akan dilakukan memengaruhi komitmen dalam berkolaborasi. Kurangnya kepercayaan ini lah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya komitmen masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Ansell dan Gash (2008: 559) bahwa, "*commitment depends on trust*". Selain itu, terdapat alternatif lain untuk mencapai tujuan yang serupa, yaitu dengan berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata yang juga dilakukan di kawasan geopark. Sehingga, meskipun belum ikut serta secara aktif dalam pengembangan geopark tidak memengaruhi kondisi para *stakeholder* tersebut.

Berbeda dengan para *stakeholder* sebelumnya, Bappedalitbang dan Unpak memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan Geopark Pongkor. Bappedalitbang memberikan peluang kepada Unpak untuk melakukan riset yang penting bagi pembangunan daerah, dimana pelaksanaan riset tersebut juga berperan dalam memenuhi tujuan-tujuan Unpak selaku universitas. Maka dengan adanya hubungan yang saling menguntungkan ini menguatkan komitmen dalam melakukan kolaborasi, sebab pemangku kepentingan menganggap pencapaian tujuan mereka bergantung pada kerja sama dengan pihak lain (Ansell & Gash 2008; Imperial 2005; Logsdon 1991).

d. Pemahaman Bersama

Dalam kolaborasi setiap *stakeholder* perlu mengembangkan pemahaman terkait tujuan bersama, kesepakatan, serta masalah yang dihadapi. Sehingga, dapat dicari solusi bersama apabila sewaktu-waktu timbul masalah.

Untuk meningkatkan pemahaman bersama di antara para *stakeholder* diperlukan komunikasi atau *face to face dialogue*. Namun, komunikasi/pertemuan tatap muka yang masih minim jumlahnya dan belum dilakukan secara merata kepada setiap *stakeholder* mengakibatkan adanya masalah dalam pemahaman bersama. Hal pertama yang menjadi permasalahan adalah terkait pemahaman mengenai pemberian nama geopark. Disbudpar, Kecamatan Nanggung, dan masyarakat menganggap bahwa dengan penggunaan nama Pongkor seolah-olah geopark merupakan milik PT. Antam. Padahal, pemberian

nama Pongkor dimaksudkan untuk menonjolkan potensi emas di Kabupaten Bogor. Adanya perbedaan persepsi mengenai pemberian nama ini tidak sesuai dengan aspek kolaborasi yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap nilai-nilai inti (Heikkila & Gerlak, 2005) dan ideologi bersama (Waage, 2001).

Kemudian, terkait perpanjangan IUP yang dilakukan PT. Antam, pihak Bappedalitbang dan Unpak, menyatakan bahwa hal tersebut pengembangan Geopark Pongkor tetap bisa dilakukan dan mendapat dukungan positif. Sebaliknya, Disbudpar, Kecamatan Nanggung, dan masyarakat mengungkapkan bahwa hal itu akan menghambat pengembangan yang dilakukan. Adanya perbedaan pemahaman oleh tiap *stakeholder* ini menunjukkan bahwa belum ada upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai masalah yang ada, sehingga informasi masih didasarkan pada persepsi masing-masing pihak. Padahal dalam kolaborasi pemahaman bersama tentang definisi masalah sangat diperlukan untuk menemukan solusi (Bentrup 2001; Pahl-Wostl & Hare 2004).

e. Adanya Hasil Konkret

Kolaborasi biasanya akan mengarah pada kesuksesan apabila terdapat hasil nyata dari proses yang dilakukan. Pada kolaborasi dalam pengembangan Geopark Pongkor, hasil (*outcome*) yang sudah dirasakan adalah baru dalam jangka pendek. Padahal, idealnya hasil jangka menengah sudah mulai dirasakan saat ini, karena pengembangannya sudah memasuki tahun keempat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan, belum ada hasil nyata yang dirasakan dalam kegiatan pengembangan geopark dikarenakan banyaknya masalah dalam internal Badan Pengelola. Masyarakat sendiri belum merasakan dampak maupun keuntungan yang diperoleh dari adanya geopark, karena fasilitas yang belum terbangun dan belum ada anggaran yang diberikan untuk melakukan pengembangan objek wisata. Sebagaimana dinyatakan oleh Ansell dan Gash (2008: 561) bahwa dengan kurangnya kepercayaan, komitmen, dan hubungan yang buruk maka keuntungan menjadi aspek yang sangat penting untuk memulai kolaborasi. Namun berdasarkan observasi, penulis melihat indikator hasil ini menjadi salah satu penyebab Disbudpar, Kecamatan Nanggung, dan masyarakat lebih berfokus pada kegiatan pengembangan Desa Wisata. Hal ini dikarenakan dengan konsep kegiatan yang serupa, pengembangan Desa Wisata telah memberikan lebih banyak keuntungan berupa fasilitas, anggaran yang besar, serta keleluasaan bagi masyarakat dalam mengelola yang mana tidak didapatkan pada kolaborasi pengembangan Geopark Pongkor.

SIMPULAN

a. SIMPULAN

Proses kolaboratif dalam pengembangan Geopark Pongkor sebagai kawasan pariwisata di Kabupaten Bogor yang terjalin di antara *stakeholder* pemerintah, akademisi, bisnis, dan masyarakat belum optimal. Proses kolaboratif yang belum optimal ini disebabkan oleh belum sinergisnya

stakeholder kolaborasi. Para pemangku kepentingan yang seharusnya berkolaborasi satu sama lain belum menjalankan perannya sesuai dengan tupoksi dan kemampuannya masing-masing, serta belum mengindahkan aspek-aspek penting dalam pelaksanaan proses kolaboratif, yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses kolaborasi, pemahaman bersama, dan adanya hasil konkret. Komunikasi yang belum dilakukan dengan intens dan melibatkan seluruh *stakeholder* secara aktif ini pada akhirnya berpengaruh pada kurangnya kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama. Sehingga, hasil nyata juga sulit diperoleh.

b. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran mengenai proses kolaboratif dalam pengembangan Geopark Pongkor sebagai kawasan pariwisata di Kabupaten Bogor. Beberapa hal yang perlu dilakukan agar proses kolaboratif dapat berjalan secara optimal adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan seluruh *stakeholder* kolaborasi secara aktif dalam kegiatan pengembangan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin yang menjadi sarana bagi seluruh *stakeholder* untuk saling menyampaikan aspirasi, progress, maupun masalah yang sedang dihadapi.
2. Bappedalitbang dan Disbudpar bersama-sama melakukan diskusi terkait penyesuaian kegiatan pengembangan Geopark Pongkor dengan pengembangan Desa Wisata agar tujuan-tujuan yang ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
3. PT. Antam UBPE Pongkor dan masyarakat di kawasan Geopark Pongkor bersama-sama melakukan diskusi terkait mekanisme pengelolaan kawasan wisata yang berada di kawasan pertambangan PT. Antam dengan difasilitasi oleh pemerintah melalui Bappedalitbang/Disbudpar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Government*. Georgetown University Press.
- Cresswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- O'Flynn, J., & Wanna, J. (2008). *Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia?* ANU E Press. The Australian National University.
- Suwardi, S., Kusumahbrata, Y., & Samodra, H. (2016). *Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Geopark Indonesia*. Bandung: Sekretariat Badan

Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dokumen

- Dokumen Pengusulan (*Dossier*) Geopark Pongkor Menjadi Anggota Jaringan Geopark Nasional Indonesia Tahun 2018. Bogor: Bappedalitbang.
- Dokumen Paparan Kepala Bappedalitbang Pengembangan Geopark Pongkor Tahun 2018. Bogor: Bappedalitbang.
- Dokumen Rapat Koordinasi Badan Pengelola Geopark Pongkor Tahun 2018. Bogor: Bappedalitbang.
- Dokumen Rencana Aksi Multipihak (RAM-IP) Tahun 2018-2023. Bogor: Bappedalitbang.
- Laporan Akhir Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Geopark Pongkor Tahun 2019. Bogor: Bappedalitbang.

Jurnal

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1–29.
- Han, J., Wu, F., Tian, M., & Li, W. (2017). From Geopark to Sustainable Development: Heritage Conservation and Geotourism Promotion in the Huangshan UNESCO Global Geopark (China). *The European Association for Conservation of the Geological Heritage*.
- Yuliawati, A. K., Pribadi, K. N., & Hadian, M. S. (2016). Geotourism Resources as Part of Sustainable Development in Geopark Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 15, 962–965

Peraturan/Regulasi

- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kawasan Geopark di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*).
- Surat Keputusan Bupati Nomor: 556/122/Kpts/Per-UU/2018 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Geopark Pongkor.
- Surat Keputusan Bupati Nomor: 556/136/Kpts/Per-UU/2020 tentang Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Geopark Pongkor.
- Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 430/Kep.652-Rek/2019 tentang Komite Daerah Geopark Jawa Barat.